



Judul Tugas Akhir Skripsi atau Tugas Akhir Selain Skripsi:

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dalam Pemanfaatan Energi Panas Bumi. Studi Kasus: Konflik Pemanfaatan Energi Panas di Kawasan Dieng, Jawa Tengah.

Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Selain Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

Nama: Muhamad Fatih Praga Ilhaq

NIM: 1710413026



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fatih Praga Ilhaq
NIM : 1710413026
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dalam Pemanfaatan Energi Panas Bumi. Studi Kasus: Konflik Pemanfaatan Energi Panas di Kawasan Dieng, Jawa Tengah.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.



Jakarta, 2 Januari 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang di kutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Muhamad Fatih Praga Ilhaq
Nim : 1710413026
Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Jakarta, 2 Januari 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Muhamad Fatih Praga Ilhaq
NIM : 1710413026
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Intensi Pemerintah Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dalam Pemanfaatan Energi Panas Bumi. Studi Kasus: Pemanfaatan Energi Panas di Kawasan Dieng, Jawa Tengah.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing Utama



Restu Rahmawati, S.IP, MA

Pembimbing Pendamping



Danis Tri Saputra, S.IP.M.IP.

Ketua Program Studi



Anwar Ilmar, S.Sos., M.IP.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PANAS BUMI DALAM PEMANFAATAN ENERGI PANAS
BUMI. STUDI KASUS: KONFLIK PEMANFAATAN ENERGI PANAS DI
KAWASAN DIENG, JAWA TENGAH**

MUHAMAD FATIH PRAGA ILHAQ

ABSTRAK

Peran regulasi tentang panas bumi sangat penting untuk menjadi landasan hukum dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi adalah salah satu energi baru terbarukan yang perlu pemerintah dorong pemanfaatannya untuk merealisasikan target pemerintah dalam penggunaan energi bersih nasional. Namun permasalahan yang kerap kali muncul, kebijakan tentang panas bumi masih belum optimal dalam pencapaian target energi bersih nasional. Dalam proses perancangan kebijakan terdiri setidaknya mencakup identifikasi masalah, skala prioritas, alternatif kebijakan, penetapan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini penulis fokus untuk melihat pada perancangan kebijakan tahapan kedua yaitu skala prioritas. Pada tahapan penentuan skala prioritas ini intensi pemerintah menjadi hal yang memiliki pengaruh tentang apa apa saja yang ingin pemerintah capai melalui regulasi tersebut. Sehingga, menurut penulis penafsiran dari intensi pemerintah menjadi hal penting untuk berkontribusi dalam evaluasi kedepannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data penelitian secara mendalam dan sumber data pada penelitian ini penulis ambil dari data primer maupun sekunder. Data primer penulis dapatkan dari wawancara langsung para pihak pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Data sekunder penulis dapatkan dari publikasi tulisan pihak lain. Kemudian data-data penelitian tersebut penulis olah dengan menggunakan metode kualitatif untuk menafsirkan intensi pemerintah.

Kata Kunci: Panas Bumi, Energi Baru Terbarukan, Undang-Undang No 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

**IMPLEMENTAION OF LAW NUMBER 21 OF 2014 CONCERNING
GEOTHERMAL IN GEOTHERMAL CULTIVATION. CASE STUDY:
CIVILIAN CONFLICT IN GEOTHERMAL DIENG, MID JAVA.**

MUHAMAD FATIH PRAGA ILHAQ

ABSTRACT

The role of regulation on geothermal is very important to become a legal basis in encouraging the use of geothermal energy. Geothermal energy is one of the renewable energies that the government needs to encourage its use to realize the government's target in the use of national clean energy. However, the problem that often arises is that policies regarding geothermal are still not optimal in achieving the national clean energy target. The policy design process consists of at least the identification of problems, priority scale, policy alternatives, determination, and evaluation of policies. In this study, the authors focus on looking at the second stage of policy design, namely the priority scale. At this stage of determining the priority scale, the government's intention becomes something that has an influence on what the government wants to achieve through the regulation. Thus, according to the author, the interpretation of the government's intention is important to contribute to future evaluations. In this study, the authors used qualitative methods to analyze research data in depth and the data sources in this study were taken from primary and secondary data. The author's primary data was obtained from direct interviews with government parties and parties outside the government who have links with Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal. The author's secondary data is obtained from the publication of other parties' writings. Then the research data is processed by using qualitative methods to interpret the government's intentions.

Key Word: Geothermal, New Renewable Energy, Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Intensi Pemerintah Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dalam Pemanfaatan Energi Panas Bumi. Skripsi ini menjadi suatu bukti bahwa mahasiswa telah menuntaskan kuliah jenjang program Strata-1 dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.
2. Kedua Orang Tua yaitu Ayah dan Ibu serta Adik dan Kakak yang telah memberikan do'a serta dukungan baik moral maupun materi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Anwar Ilmar, S.sos., M.IP sebagai Kaprodi Ilmu Politik FISIP UPN "Veteran" Jakarta.
4. Ibu Restu Rahmawati, S.IP, MA selaku dosen pembimbing 1, dan juga Bapak Danis Tri Saputra, S.IP.M.IP. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan kritik dan masukan-masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UPN 'Veteran' Jakarta;
6. Para Narasumber yang sudah membantu dan bersedia untuk di wawancara
7. Kerabat dekat penulis yang telah mendukung dan membantu serta memberikan Do'a selama menyelesaikan Skripsi.
8. Rekan-rekan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017;
9. Serta seluruh pihak dan khususnya orang-orang terdekat penulis yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini melalui dukungan moral dan semangat;

Dukungan yang diberikan oleh semua pihak yang telah penulis sebutkan sangat berartian berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari

bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi menambah wawasan dan pengetahuan, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun hingga lebih sempurna. Penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 2 Januari 2022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	5
ABSTRACT.....	6
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.4.1 Manfaat Akademis	22
1.4.2 Manfaat Praktis	23
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
KAJIAN KEPUSTAKAAN	25
2.1 Penelitian Terdahulu	25
2.2 Teori	31
2.2.1. Kebijakan Publik	31
2.2.2 Politik Hukum	35
2.3 Konsep	36
2.4. Kerangka Berpikir	38
BAB III	41
METODE	41
3.1. Metode Penelitian	41
1. Subject dan Output	41
2. Implementation	41
3.2. Teknik Pengumpulan data.....	41
3.3. Sumber Data	42

Muhammad Fatih Praga Ilhaq, 2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DALAM PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI. Studi Kasus: Konflik Pemanfaatan Energi Panas di Kawasan Dieng, Jawa Tengah.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder	43
BAB IV	44
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum.....	44
4.1.1 Landasan Pembentukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.....	46
4.1.2 Pihak yang Tercantum di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.....	48
4.1.2.1 Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	49
4.1.2.2 Badan Usaha Pemanfaatan Energi Panas Bumi.....	52
4.1.2.3 Masyarakat Sekitar	53
4.1.2.4 Penyidik.....	54
4.1.3 Substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	55
4.1.3.1 Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Panas Bumi.....	56
4.1.3.2 Pengusahaan Panas Bumi	63
4.1.3.3 Peran Masyarakat Sekitar	68
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	71
4.2.1 Peningkatan Pemanfaatan Energi Bersih.....	72
4.2.2 Pemeliharaan Lingkungan.....	77
4.2.3 Aspek Ekonomi.....	79
4.3 Implementasi Kebijakan	84
a) Komunikasi	84
b) Sumber Daya	85
c) Disposisi.....	85
d) Struktur Birokrasi.....	86
BAB V	88
PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 Urutan negara penghasil energi panas bumi terbesar	16
Gambar1. 2 Urutan negara dengan potensi energi bumi terbesar	17
 Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	 30
 Gambar 4. 1 Poin A latar belakang pembentukan UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	 47
Gambar 4. 2 Poin B latar belakang pembentukan UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	47
Gambar 4. 3 Poin C latar belakang pembentukan UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	48
Gambar 4. 4 Poin D latar belakang pembentukan UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	48
Gambar 4. 5 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 6 Ayat 1	49

Gambar 4. 6 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 7.....	50
Gambar 4. 7 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 8.....	51
Gambar 4. 8 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 20.....	52
Gambar 4. 9 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 65 Ayat 1	53
Gambar 4. 10 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 65 Ayat 2	54
Gambar 4. 11 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 24 Ayat 1	57
Gambar 4. 12 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 29.....	58
Gambar 4. 13 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 31.....	59
Gambar 4. 14 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 32.....	59
Gambar 4. 15 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 34.....	60
Gambar 4. 16 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 35.....	60
Gambar 4. 17 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 36.....	61
Gambar 4. 18 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 37.....	62
Gambar 4. 19 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 38.....	62
Gambar 4. 20 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 13.....	64
Gambar 4. 21 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 48.....	64
Gambar 4. 22 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 22.....	65
Gambar 4. 23 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 51.....	66
Gambar 4. 24 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 52.....	67
Gambar 4. 25 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 54.....	68
Gambar 4. 26 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 65 Ayat 1	69
Gambar 4. 27 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 65 Ayat 2	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Bab dalam UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	56
Tabel 4. 2 Sebaran 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia (Sumber : https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-dia-sebaran-pembangkit-listrik-panas-bumi-di-indonesia).....	74